

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH , BELANJA
MODAL DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

RINGKASAN TESIS

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E)
Pada Program Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Tanjungpura

Oleh:

PRANTINI

B.61108002



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2014**

Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK

Dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti bahwa kegiatan perekonomian di daerah tersebut meningkat, sehingga akan berdampak juga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan daerah ini dan meningkatkan belanja modal.

Perlu adanya analisis perkembangan PAD Propinsi Kalimantan Barat dari sisi penerimaan dan sisi pengeluaran sehingga kita dapat mengetahui sejauhmana PAD telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hubungan Pendapatan Asli daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum non linier, positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara statis negatif dan signifikan. Berbeda dengan PAD perkembangan nilai realisasi belanja modal pemerintah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kata kunci : PAD, DAU, signifikan, Pertumbuhan Ekonomi

Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Kalimantan Barat

ABSTRACT

By increasing the local revenue, the economic activity in West Kalimantan will rises and so does the economic growth. It'll also have the same impact on capital expenditure. it's important to analyze the market development of the local revenue in West Kalimantan so we will know how the local revenue impact on the economic growth.

There's positif significant relation from capital expenditure and non linear general allocation fund to economic growth in West Kalimantan. On the other hand, the local revenue has the negative impact. Unlike the local revenue development, value of government capital expenditure increase for years.

Keywords: PAD, DAU, signifikan, economic growth

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya Pembangunan Ekonomi untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, oleh karena itu sampai pada batas-batas tertentu diperlukan campur tangan pemerintah dalam mewujudkannya. Intervensi pemerintah terutama diperlukan karena adanya kegagalan pasar (*market failure*) yang disebabkan oleh: (i) barang publik (*public goods*), (ii) eksternalitas, (iii) monopoli alamiah dan (iv) informasi tidak sempurna (Stiglitz 2000).

Pengelolaan keuangan Negara/daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan (perbaikan) seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan Otonomi Daerah. Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya.

Pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur keuangan diantaranya: (1) penerimaan daerah dari bagi hasil sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki sumberdaya alam seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan; (2) penerimaan daerah dari

bagi hasil pajak yang merupakan dana yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagian daerah ini tergolong sebagai penerimaan daerah dengan persentase pembagiannya tidak mengalami perubahan; dan (3) skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang formulanya beberapa kali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
- 1.2.2 Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?
- 1.2.3 Apakah DAU (Dana Alokasi Umum) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat?
- 1.2.4 Apakah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
- 1.3.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.3.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.3.4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Metodologi

1.4.1. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia, yaitu analisis regresi berganda dengan data panel.

1.4.2. Pemilihan Model Regresi

Untuk memperlihatkan besarnya pengaruh PAD, Belanja Modal Pemerintah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi, digunakan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y_{gro} = \beta_0 + \beta_1 X_{pad} + \beta_2 X_{bm} + \beta_3 X_{dau} + e$$

1.4.3. Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS (*ordinary least square*).

1.4.4. Melakukan beberapa Uji Hipotesis

- Uji Hipotesis (Uji-t)

- Uji Hipotesis (Uji –F)

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil

2.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL –VARIABEL PENELITIAN

Variabel (Juta Rp)	Statistik Deskriptif				
	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000	6.606.127 ,09	404.439,0 3	7.010.567 ,02	023.160,43	1.569.231 ,72
Dana Alokasi Umum	759.653,40	139.404,30	899.057,70	385.532,07	163.126,63
Pendapatan Asli Daerah	86.928,00	440,00	87.368,00	18.218,79	16.890,37

Sumber : Data Olahan

Tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 12 data kabupaten/kota di Kalimantan Barat adalah Rp. 18.218,79 juta dengan PAD terendah adalah Rp 440 juta, tertinggi Rp 87.368 juta dan standar deviasi Rp. 16.890,37 juta, lebih dari 30% dari nilai rata-rata menunjukkan variasi yang besar atau relatif tingginya kesenjangan antara nilai terendah dan tertinggi. Pada variabel independen kedua, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 385.532,07 juta, nilai tertinggi sebesar Rp 899.057,70 juta, nilai terendah sebesar Rp 139.404,30 juta dan nilai standar deviasinya adalah Rp 163.126,63 juta menunjukkan adanya variasi yang besar karena nilainya yang lebih besar 30% dari nilai mean.

2.1.2. Struktur Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

PENERIMAAN TOTAL 12 KABUPATEN DAN KOTA DI KALIMANTAN BARAT MENURUT SUMBER PENERIMAAN TAHUN 2004 DAN 2011 SERTA PERTUMBUHANNYA

Sumber Penerimaan	2004	%	2011	%	Pertumbuhan
PAD	92.937,93	3,81	419.383,37	5,31	20,73
BHPBP ^{*)}	216.449,49	8,88	451.449,94	5,71	9,62
DAU	.914.177,18	78,57	6.043.963,34	76,50	15,46
Lain-lain	212.609,89	8,73	985.971,76	12,48	21,14
Total	.436.174,48	100,0	7.900.768,42	100,00	15,84

^{*)} BHPBP: Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel diatas menunjukkan perubahan penerimaan Kalimantan Barat periode tahun 2004 dan 2011 menurut sumber penerimaan. PAD mengalami perubahan sebesar 20,73% rata-rata per tahun dari tahun 2004 ke tahun 2011. Perubahan ini merupakan perubahan yang relatif besar dibandingkan dengan perubahan jenis sumber penerimaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah belum optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut BPS (2008) ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah yaitu:

- a. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemda akan tetapi berada di luar penerimaan pemerintah daerah.

- b. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita.
- c. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer dari pusat, mempunyai kontribusi terbesar dari total penerimaan daerah. Besarnya kontribusi DAU terhadap total penerimaan daerah mengindikasikan masih lemahnya anggaran daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja fiskal penerimaan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat melalui PAD belum menunjukkan hasil optimal. Dengan kata lain, pembiayaan pembangunan Kalimantan Barat sebagian masih bergantung pada pusat.

Besarnya penerimaan total Provinsi Kalimantan Barat tentu tidak terlepas dari bagaimana kondisi penerimaan daerah masing-masing kabupaten/kotanya. Terdapatnya potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota tentu berakibat pada besaran jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap daerah. Tabel 2.1.2 menunjukkan dari 12 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak pada tahun 2011 merupakan daerah yang memiliki kontribusi penerimaan daerah terhadap total penerimaan provinsi terbesar dengan kontribusi sebesar 34,84%. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat tentunya mempunyai kegiatan ataupun fasilitas yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain.

2.1.3. Penentuan Jenis Model

Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk suatu fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah nonlinier dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini juga dilakukan uji spesifikasi model

Hasil estimasi dari uji MWD dapat dilihat dibawah ini:

HASIL UJI MWD

Variabel	Nilai Statistik t	Probabilitas
Z1	-4,321	0,000
Z2	-0,517	0,606

Sumber: Hasil Penelitian (lampiran 2)

Hipotesis:

H0 : menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk linear

H1 : menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk log linear.

Dari hasil uji MWD di atas menunjukkan bahwa Z1 signifikan secara statistik karena tingkat signifikannya sebesar 0,0000 ($<0,05$) artinya menolak H0 dan menerima H1, jadi model yang benar adalah non linier.

Hipotesis:

H0 : menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk log linear

H1 : menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk linear.

Dari hasil uji MWD di atas menunjukkan bahwa Z2 tidak signifikan secara statistik karena tingkat signifikannya sebesar 0,606 ($>0,05$) artinya menerima H0, jadi model yang benar adalah non linier. Dari hasil kedua hipotesa diatas maka model yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah model regresi non linear:

$$\text{LnY}_{\text{pdrb}} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnX}_{\text{pad}} + \beta_2 \text{LnX}_{\text{bm}} + \beta_3 \text{LnX}_{\text{dau}} + e$$

2.1.4 Kriteria Statistik

Analisis pengaruh PAD, Belanja Modal dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dihitung dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnY}_{\text{pdrb}} = -0,982 + 0,506\text{LnX}_{\text{pad}} + 0,257\text{LnX}_{\text{bm}} + 0,506\text{LnX}_{\text{dau}}$$

HASIL REGRESI ANTARA VARIABEL DEPENDEN DENGAN VARIABEL INDEPENDEN

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.982	1.546		-.635	.527
Ln Pendapatan Asli	.506	.062	.648	8.136	.000
Ln Belanja Modal	.257	.045	.463	5.660	.000
LnDAU	.506	.148	.302	3.425	.001

R-Squared = 0,751 Adjusted R² = 0,563

F-Statistik = 39.559 (sig= 0,0000)

DW = 1.666804

2.1.5. Uji F (Pengujian Secara Serempak)

1. Hipotesis

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$, artinya secara bersama-sama variabel LnX_{pad} , LnX_{bm} , LnX_{dau} tidak berpengaruh terhadap Y_{pdrb}

Ha: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4$, artinya secara bersama-sama variabel LnX_{pad} , LnX_{bm} , LnX_{dau} berpengaruh terhadap Y_{pdrb}

$$F_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05; k-1: n-k)$$

$$= (\alpha = 0,05; 3: 93) = 2,68$$

$$F_{\text{hitung}} = 39,559$$

Karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, yaitu $786.9509 > 2,68$ maka statistik uji jatuh pada H_0 ditolak

dan H_a diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen (L_nX_{pad} , L_nX_{bm} , L_nX_{dau}) mempengaruhi (Y_{pdrb}) atau PAD, Belanja Modal, DAU secara bersama-sama mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2004-2011. Pengujian ini diperkuat dengan tingkat signifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05.

2.1.6. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (L_nX_{pad}) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

Hipotesis: $H_0: \beta_i \leq 0$, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (L_nX_{pad}) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

$H_a: \beta_i > 0$, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (L_nX_{pad}) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05 : df = 93) = 1,645$$

$$t_{\text{hitung}} = 8,136$$

Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, yaitu $8,136 > 1,645$ statistik uji jatuh pada H_0 ditolak dan H_a

diterima. Berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2004-2011. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikansi 0.0022 lebih kecil dari 0,05.

b. Pengaruh Belanja Modal (LnX_{bm}) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

Hipotesis: $H_0: \beta_i \leq 0$, artinya variabel Belanja Modal (LnX_{bm}) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

$H_a: \beta_i > 0$, artinya variabel Belanja Modal (LnX_{bm}) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05 : df = 93) = 1,645$$

$$t_{\text{hitung}} = 5,660$$

Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, yaitu $5,660 > 1,645$ statistik uji jatuh pada H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti Belanja Modal Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2004-2011. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05.

c. Pengaruh Dana Alokasi Umum (LnX_{dau}) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

Hipotesis: $H_0: \beta_i \leq 0$, artinya variabel Dana Alokasi Umum (LnX_{dau}) tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

$H_a: \beta_i > 0$, artinya variabel Dana Alokasi Umum (LnX_{dau}) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Y_{pdrb}).

$$t_{\text{tabel}} = (\alpha = 0,05 : df = 93) = 1,645$$

$$t_{\text{hitung}} = 3,425$$

Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, yaitu $3,425 > 1,645$ statistik uji jatuh pada H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/kota berpengaruh secara

parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2004-2011. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0,05.

2.1.7 Kriteria Ekonometrik

- Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis, yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 . berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,751 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Pemerintah dan Dana Alokasi Umum mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 75,10% dan sisanya 24,90% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Pemerintah dan Dana Alokasi Umum

-Uji Multikolinieritas

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS METODE VIF (Varian Infloating Factor)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.982	1.546		-.635	.527		
Ln Pendapatan Asli Daerah	.506	.062	.648	8.136	.000	.747	1.338
Ln Belanja Modal	.257	.045	.463	5.660	.000	.710	1.407
LnDAU	.506	.148	.302	3.425	.001	.611	1.637

-Uji Heterokedastisitas

HASIL UJI HETEROKEDASITASMETODE GLEJSER

Model	Unstandardized		Standardiz	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-841.891	1946.525		-.433	.666
Ln Pendapatan Asli	296.825	78.342	.421	3.789	.000
Ln Belanja Modal	-63.216	57.210	-.126	-1.105	.272
LnDAU	-39.095	186.053	-.026	-.210	.834

Sumber: Hasil Penelitian (lampiran 5)

Dari hasil uji metode Glejser dapat dilihat bahwa nilai-nilai Signifikan variabel t hitung untuk masing-masing peubah bebas adalah untuk peubah acak X1 Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan secara statistik ini mengindikasikan bahwa maka terjadi gejala heteroskedastias sedangkan dua peubah acak lainnya nilai t hitungnya tidak signifikan. Berarti untuk peubah acak belanja modal dan Dana Alokasi Umum masing-masing tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

-Uji Autokorelasi

HASIL UJI AUTOKORELASI Metode DURBIN WATSON

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 ^a	.563	.549	.48189	1.922

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson Statistik adalah 1,922 dan apabila dibandingkan dengan nilai tabel statistik Durbin Watson maka tidak terdapat masalah Multikolinearitas dari variabel Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.2. Pembahasan

2.2.1 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diprovinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin meningkat nilai PDRB Pemerintah Daerah tersebut. (Saragih, 2003).

2.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Modal Daerah menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan Pemerintah Daerah maka semakin meningkat nilai PDRB Pemerintah Daerah tersebut.

2.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dana Alokasi Umum menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dau yang diterima Pemerintah Daerah maka semakin meningkat nilai PDRB Pemerintah Daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU.

2.2.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi

Kalimantan Barat. Semakin tinggi PAD maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah. DAU juga berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

3.1. Kesimpulan

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum adalah non linear, positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat secara statistik positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perekonomian Kalimantan Barat sangatlah penting. Selama ini Pemerintah Daerah belum optimal dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan nilai PAD.
3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat secara statistik negatif dan signifikan. Berbeda dengan PAD, perkembangan nilai realisasi Belanja Modal pemerintah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya nilai dorongan belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, ternyata berbanding terbalik dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi. Ini menunjukkan bahwa peranan penanaman modal oleh

pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat cukup penting walaupun elastisitas yang terjadi relatif kecil apabila dibandingkan dengan perubah acak yang lainnya.

3.2 Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil studi empiris yang dilakukan maka ada beberapa saran dan kebijakan yang kebijakan yang dapat diberikan untuk pihak-pihak yang terkait, yakni :

1. Untuk mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus mampu menggali potensi sumber-sumber PAD dengan terus meningkatkan basis pajak / retribusi daerah yang belum tergali secara optimal dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mewujudkan kemampuan daerah dalam berotonomi maka wewenang daerah untuk memungut pajak (tax assignment) harus terus diadakan perbaikan sistim dan prosedur pemungutan pajak. Hal ini berdasarkan pendapat yang mengatakan local taxing power merupakan syarat cukup bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas, apalagi Propinsi Kalimantan Barat memiliki berbagai sumber daya perekonomian yang potensial untuk menjadi sumber PAD.
3. Untuk meningkatkan kemampuan Kal-Bar dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi, maka secara perlahan harus mulai mengurangi ketergantungan akan dana dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan, DBH, DAU dan DAK serta menjadikan PAD sebagai sumber motor penggerak Pertumbuhan Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *PDRB Menurut Sektoral*, berbagai edisi, BPS Propinsi Kalimantan Barat.
- _____, *PDRB Menurut Penggunaan*, berbagai edisi, BPS Propinsi Kalimantan Barat.
- _____, *Kalimantan Barat Dalam Angka*, berbagai edisi, Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2008. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah TK II Tahun 2002-2007*. Jakarta: BPS.
- [BAPPENAS] Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 1999. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- Baltaqi BH. 2001. *Econometric Analysis of Panel data*. New York : John Wiley & Sons, LTD.
- Bellinger, WK. 2007. *The Economics Analysis of Publik Policy*. Routledge.
- Bird R, Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Blanchard O. 2006. *Macroeconomics*. Fourth edition. New Jersey, Prentice Hall.
- [DPR] Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2004a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [DPR] Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2004b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Enders, W. 1995. *Applied Econometric Times Series*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Halim A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Holtz-Eakin D, W.K. Newey, H.S. Rosen. 1988. Estimation Vector Auto-regressions with Panel Data. *Econometrica* 56:1371-1395.
- Junsoo M. 1988. Summary of Estimating Vector Autoregressions with Panel Data Holtz-Eakin, Newey and Rosen. *Econometrica*.

- KharismaB. 2006. Peran Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi : Pendekatan Model Ekonometrika periode 1995-2005.[Tesis]. Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca sarjana, FE UI.
- KuncoroM. 2004. *Otonomi Daerah, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- LandiyantoA. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya.*Cures Working Paper* No. 05/ Januari 2005.
- MangkoesebrotoG. 1997. *Ekonomi Publik*.Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyana B. 2006. Keuangan Daerah : Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia.[Http//www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id).
- Priyarsono DS, Widyastutik, Henny R. 2008.*Ekonomi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Setiaji W, Aji PH. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran. Studi Pada Kabupaten Kota se Jawa Bali. Simposium Nasional Akutansi X. Unhas. Makasar.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduose Media.
- Stiglitz, J.E. 2000.*Economics of the Public Sektor*.Third Ed. New York: W.W. Norton & Company.
- SyaibaniM. 2005. Pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Ekonomi daerah di Indonesia (Studi Kasus Tingkat propinsi tahun 2001-2003). [Tesis]. Depok: Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca sarjana, FE UI.
- TodaroM, Stepen SmithC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1.Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- WidarjonoA.2007. *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta:FE UII.